

SEJARAH PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Fia Amelia¹, Icah Munika², Diana Purnamasari³

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3}

Email : fiaamelia144@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep dari Pendidikan Multikultural di Indonesia, dan tentunya sebelum itu juga harus mengetahui apa itu Multikultural dan juga bagaimana Sejarah dari Pendidikan Multikultural ini. Dengan menggunakan Metode Penelitian Studi Literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan bersumber dari tulisan-tulisan sebelumnya baik karya tulis maupun hasil penelitian. Sumber tersebut boleh didapat dari karya tulisan yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (Melfianora, 2019). Kemudian hasil yang diharapkan yaitu dapat menjelaskan bagaimana Sejarah Pendidikan Multikultural di Indonesia. Pendidikan Multikultural adalah bentuk gerakan reformasi pendidikan di Amerika pada tahun 1960-an. Reformasi pendidikan yang dulunya merupakan pendidikan segregasi atau mengkotak-kotakan kelas sosial, suku agama, dan ras, kemudian berubah dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan.

Kata Kunci : Pendidikan, Multikultural, Konsep, Sejarah.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan kemajuan sebuah negara adalah pendidikan. Ada banyak agama, bahasa, ras, suku, dan adat di Indonesia. Keanekaragaman inilah yang membuat negara ini plural. Pendidikan dapat menggabungkan semua perbedaan ini supaya tidak ada diskriminasi yang menyudutkan satu pihak ke pihak lainnya, yang menghambat pembangunan Indonesia.

Pendidikan Multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai akibat dari keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pendidikan Multikultural menekankan filosofi pluralisme budaya dalam sistem pendidikan. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti menghormati, menerima, persamaan, dan komitmen moral untuk keadilan sosial. Pendidikan Multikultural harus dipahami dan dipahami dengan baik karena sangat penting untuk memerangi konflik dan memastikan bahwa siswa tidak meninggalkan akar budayanya. Pendidikan Multikultural juga sangat relevan untuk demokrasi modern.

Pendidikan Multikultural menghormati keberagaman dan perbedaan. Pendidikan selalu menciptakan proses yang kompleks yang memungkinkan setiap kebudayaan untuk mengekspresikan dirinya. Namun, mendesain hal ini secara praktis tidak mudah. Setidaknya, kita berusaha mengambil ijtihad untuk menolak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara lain, ide pemolaan dan pengembangan pendidikan Multikultural ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Seiring berjalannya waktu, pendidikan ini berkembang menjadi penelitian tentang keberagaman yang unik. Pada mulanya, itu bertujuan untuk mengajarkan mayoritas populasi untuk bersikap toleran dan tenggang rasa terhadap imigran baru. Pengalaman pendidikan Multikultural dari eropa akhirnya tiba di Indonesia, yang hingga saat ini masih bernuansa kerajaan-kerajaan Ini memberikan gambaran tentang perjalanan sejarah pendidikan Multikultural. Dalam tulisan ini, Multikulturalisme dilihat sebagai proses panjang dalam perjalanan dunia pendidikan dan situasi kenegaraan di Indonesia. Karena perkembangan dunia pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, politik, dan sejarah suatu negara, maka tulisan ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut tentang perkembangan pendidikan Multikultural di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk membuat artikel ini adalah dengan menggunakan studi literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan bersumber dari tulisan-tulisan sebelumnya baik karya tulis maupun hasil penelitian. Sumber tersebut boleh didapat dari karya tulisan yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (Melfianora, 2019).

Metode studi literatur dilakukan dengan membaca dan mencari terlebih dahulu sumber-sumber bacaan yang relevan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Sumber bacaan dapat berupa jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi, makalah serta sumber-sumber lain yang pernah dibuat sebelumnya oleh penulis lain. Hasil dari eksplorasi tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang memberikan deskripsi berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh penulis mengenai topik yang sedang dibahas dari referensi yang telah dicari sebelumnya. penelitian deskriptif hanya menggambarkan secara umum mengenai suatu topik, bukan untuk membuktikan suatu pernyataan sementara (dugaan) (Putra, 2015). Penggunaan studi literatur dalam penyusunan artikel ini merupakan Langkah yang paling tepat dan paling efektif.

PEMBAHASAN

Pendidikan Multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam respons terhadap perubahan demografis dan cultural dalam masyarakat tertentu atau bahkan di seluruh dunia. Menurut Paulo Freire, pendidikan bukanlah "menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya." Menurutnya, pendidikan harus mampu membuat masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestos sosial karena kekayaan dan kemakmuran. Menurut Ainul Yakın (2005), pendidikan Multikultural adalah pendekatan yang dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan budaya yang ada pada siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, untuk membuat belajar menjadi mudah dan efektif. Pendidikan Multikultural adalah pendidikan yang berlandaskan pada asas dan prinsip konsep Multikulturalisme yakni konsep keberagaman yang mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas, agama berdasarkan nilai dan paham demokratis yang membangun pluralisme budaya dalam usaha memerangi prasangka dan diskriminasi (Sleeter dan Grant, 1988).

Pendidikan Multikultural adalah subjek pendidikan yang relatif baru di dunia pendidikan. Karena pendidikan selalu berkaitan dengan masalah HAM, kemerdekaan dari penjajahan, dan diskriminasi rasial, pendidikan bahkan digunakan sebagai alat politik untuk memberlangsungkan kekuasaan tengah memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu, pendidikan Multikultural dapat dianggap sebagai gejala yang sangat baru dalam pergaulan manusia yang menuntut hak yang sama bagi semua orang, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama.

Pada tahun 2002, gagasan Multikulturalisme kembali muncul di Indonesia. Ini bertepatan dengan peluncuran reformasi tahun 1998 dan penerapan otonomi daerah pada tahun 1999. Dengan politik kebudayaan yang seragam dan pendekatan "permadani" untuk melihat masyarakat Multikultural, pemerintahan orde baru cenderung beroperasi secara sentralistik.

Di bawah orde baru, desentralisasi dan kedaerahan telah meningkat, yang dapat berdampak negatif pada kesatuan nasional.

Berkaitan dengan hal ini, konsep Multikulturalisme harus dihidupkan kembali. Pada dasarnya memahami Multikulturalisme yang berkembang di Amerika dan Kanada.

Bhineka Tunggal Ika, konsep sosial yang ada di Indonesia, sejalan dengan Multikulturalisme. Semangat kesatuan dalam ketidaksamaan bukanlah uniformitas dalam ketidaksamaan yang membedakan Multikulturalisme dan bhineka tunggal ika. Karena itu, penting bagi pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai Multikulturalisme yang sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Pendidikan mempromosikan Multikulturalisme dan kebhinekaan. Dunia sudah tahu apa itu pendidikan Multikultural. Untuk membantu anak atau peserta didik memahami keragaman budaya di dalam dan di luar lingkungan mereka, pendekatan Multikultural ini penting. Tingkah laku, sikap, dan pola pikir manusia dipengaruhi oleh keragaman budaya tersebut. Akibatnya, manusia memiliki cara-cara (*usage*), kebiasaan (*flok ways*), aturan (*mores*), bahkan adat istiadat (*cutomes*) yang berbeda satu sama lain (Hanum dan Rahmadonna, 2010). Pendidikan multikulturalisme juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman relativisme kebudayaan (*cultural relativism*).

Menurut Banks (2002) ada empat tujuan gerakan Multikultural yaitu: Pertama "*to help individuals gain greater self understanding by viewing themselves from the perspectives of other culture*" (membantu individu untuk memahami diri sendiri secara mendalam dengan berkaca dari kacamata budaya lain. Kedua, "*to provide student with cultural ethnic alternatives*" (membekali peserta didik dengan pengetahuan mengenai etnis dan budaya lain). Ketiga, "*to reduce the pain and discrimination that members of some ethnic groups experience because of their unique racial, physical, and cultural characteristic*" (mengurangi derita diskriminasi ras, warna kulit dan karakteristik budaya). Keempat, "*to help students to master essential reading, writing, and math skill*" (membantu para peserta didik untuk menguasai kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung).

1. Pendidikan Regregrasi

Pendidikan formal di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan dicatat dalam sejarah sejak negara itu belum didirikan. Menurut I Tsing, pendeta Budha yang pergi ke Sriwijaya pada tahun 687 masehi, Palembang menjadi pusat pendidikan agama Budha. Begitu juga ketika negara-negara kolonial seperti Portugis dan Spanyol datang pada abad ke-16. Selain tujuan menyebarkan agama Katolik, tujuan pendidikan untuk bangsa pribumi kala itu juga ada. Pendidikan agama Islam pada masa itu diberikan di surau-surau atau pondok pesantren. Jadi, pendidikan pra-Belanda didasarkan pada agama dan terbatas pada agama tertentu.

Pendidikan yang memisahkan atau menggolongkan dasar kelompok sosial pada dasarnya merupakan konsep segregasi pendidikan. Segregasi pendidikan sangat terlihat selama Kolonialisme Belanda. Kaum bumi putra (pribumi atau inlander) pada masa itu mendapat pendidikan ala kadarnya. Tidak seperti orang kaya atau keturunan penjajah (Tilaar, 2004: 132). Proses pendidikan yang diikuti oleh kaum bumi putra sangat terbatas dan ditujukan untuk kebutuhan penjajah. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pendidikan Multikultural, yang tidak membedakan akses pendidikan anak bangsa.

2. Pendidikan Bertipe *Melting-pot*

Tilaar (2004: 134) mengatakan bahwa konsep pendidikan model *melting pot* adalah ketika setiap kelompok etnis dan budaya mengakui adanya perbedaan. Mereka dapat hidup bersama dengan mengakui perbedaan. Pendidikan konsep *melting pot* di Indonesia didasarkan pada prosedur pendidikan di bawah pemerintahan Orde Baru. Selain itu, istilah "Amerikanisasi" atau "budaya Amerika" digunakan untuk pendidikan di Amerika, terutama di Hawaii.

Dengan budaya nasional Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, pemerintahan orde baru di Indonesia menerapkan metode pendidikan *melting pot*. Hal ini terlihat dalam pendidikan di semua tingkatan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Usman Pelly (2004) menunjukkan bagaimana aturan asimilasi orde

baru diterapkan pada orang China etnis di Medan. Pelajar yang berlatar belakang etnis China atau Tionghua dianggap sebagai pelajar non-pribumi, sedangkan pelajar yang berlatar belakang etnis Tionghua mengalami proses asimilasi politik dengan memasukkan tradisi atau adat istiadat mereka ke dalam budaya nasional, seperti nama dan bahasa.

3. Pendidikan Multikultural

Proses pendidikan juga dipengaruhi oleh peluncuran demokrasi Indonesia. Selama proses pendidikan, menjamin hak yang sama bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan. Indonesia memiliki banyak suku, adat istiadat, agama, dan bahasa yang berbeda, jadi pendidikan Multikultural adalah pilihan yang tepat. Tujuan pendidikan Multikultural adalah untuk mempersatukan dan memberikan kesadaran akan keanekaragaman ini. Pendidikan Multikultural dapat digunakan dalam tiga cara: sebagai falsafah pendidikan, sebagai pendekatan pendidikan, dan sebagai bidang kajian dan studi (Amirin, 2012).

Kekayaan dan keberagaman (Multikultural) Indonesia harus digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan. Pendekatan kontekstual dalam pendidikan harus mempertimbangkan keragaman budaya yang ada.

Akhir-akhir ini, ada diskusi tentang menjadikan Multikulturalisme sebagai bidang tersendiri, setelah sebelumnya menjadi bagian dari bidang studi seperti sosiologi, antropologi, dan kewarganegaraan. Tidak ada penelitian yang mempelajari secara khusus dan mendalam ketiga hal tersebut, baik dalam bentuk falsafah, pendekatan, atau bidang studi.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Dalam setiap sesi pendidikan, kata "Bhinneka Tunggal Ika" sering diucapkan. Kata-kata ini sudah digunakan sebagai semboyan sejak kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang diambil dari kitab sutasoma Tantular, digunakan oleh Kerajaan Majapahit sebagai politik kebudayaan untuk menjaga keharmonisan kehidupan beragama masyarakatnya. Kealan (dalam Setyobudi dan Alkaf, 2011) menyatakan bahwa "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua" berarti "Walaupun berbeda, namun satu juga adanya, karena tak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda." Fakta bahwa Hindu adalah agama resmi Majapahit pada saat itu, tetapi menerima Islam dan Budha juga.

Semboyan Bhineka Tunggal sangat melekat pada ingatan siswa selama pemerintahan orde baru. Ini ditanamkan dengan berbagai cara, seperti melalui lambang Bhineka Tunggal Ika yang ada di setiap sekolah, menghafal bagian-bagian dari Pancasila di kelas, dan berbagai jenis pelatihan, seperti P4, yang berarti Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila.

Selain itu, karena wilayah Majapahit yang luas, yang disebut nusantara, Ini, yang membentang dari Semenanjung Melayu hingga Papua melalui Kalimantan Utara, membutuhkan alat yang dapat menyatukan berbagai kebudayaan yang ada di wilayahnya. Kerajaan Majapahit, dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan dibantu oleh Mahapatih Gajah Mada, berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara pada saat itu. Akibatnya, Empu Tantular menulis kitab Sutasoma untuk memberikan legitimasi kekuasaan dan membenarkan penaklukan kerajaan lain dengan menggunakan politik pemersatu, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Meskipun nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam sistem pendidikan di era orde baru, identitas-identitas kebudayaan minoritas dilecehkan dengan berbagai cara di bawah nama kesatuan bangsa. Salah satu contohnya adalah politik asimilasi yang diterapkan pemerintahan orde baru terhadap orang Tionghua. Dalam situasi di mana politik asimilasi ini sangat bertentangan dengan prinsip Multikulturalisme

5. Pada Masa Reformasi

Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia mendapat dorongan baru dari Reformasi 1998, yang terjadi setelah pemerintahan orde baru. Selama era reformasi, gagasan Multikultural mulai muncul. Pada dasarnya, pendidikan Multikultural tidak baru bagi masyarakat Indonesia yang beragama dalam hal suku, agama, ras, dan golongan.

Pendidikan Multikultural selama reformasi sejalan dengan demokrasi yang lebih luas. Pada dasarnya, demokrasi memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk bersuara, mengeluarkan pendapat, dan memilih dengan cara yang tidak diskriminatif. Demokrasi juga mencerminkan pendidikan Multikultural, karena setiap anak dari setiap negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

KESIMPULAN

Pendidikan Multikultural di Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang dan sulit. Mulai dari prakolonial, kolonialisme, kemerdekaan, orde baru, reformasi, hingga pendidikan Multikultural modern. Pendidikan Multikulturalisme di masyarakat dan di sekolah telah menjadi bagian dari sejarah pendidikan negara ini. Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia telah melalui berbagai tahapan sebelum munculnya pendidikan Multikultural saat ini. Ini termasuk masa prakolonial, fase segregasi selama kolonialisme, fase melting-pot selama Orde Baru, dan fase pendidikan Multikultural saat ini.

Dewasa ini, model atau implementasi pendidikan Multikultural masih berkembang. Studi tentang Multikulturalisme dalam pendidikan dan berbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia akan terus berkembang. Pembangunan pemikiran Multikultural dan pendidikan ini sejalan dengan konteks masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanum, Farida dan Rahmadonna, Sisca.
(2010). "Implementasi Model Pembelajaran Multikultural di Sekolah Dasar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Volume 03, Nomor 1 Maret 2010
- H.A.R Tilaar. (2004). "Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional". Jakarta: Grasindo
- Ibrahim, Ruslan. (2008). "Pendidikan Multikultural: Era Pluralitas Agama". El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam. Vol.1 No.1 (2008). Hal. 115-127
- Mahfud, Choirul. (2010.) "Pendidikan Multikultural". Yogyakarta: Pustaka Pelajar Mania, Sitti (2010). "Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran". Lentera Pendidikan, Vol. 13 No. 1 Juni 2010.
- O.K Nurcahyo (2015). "Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis". Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi Vol. 2 No.1 Maret 2018 p.105-115
- Nurhuda Abid. "Sejarah Munculnya Paham Pendidikan Multikultural". Makalah. UIN Raden Mas Said Surakarta